

Peran Oposisi sebagai Checks and Balance dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Bedjo Sukarno *)

A group of people or political parties to put my self in his position as an opposition which has a strong enough legal basis to criticize and supervise the strict policies of the ruling government's policies. In an effort to play an opposition role, contributing ideas for the creation of a clean government and the realization of the political system and democratic political behavior.

Keyword: Role of cheks and balance, a democratic political system

*) Dosen pada FISIP UNISRI

Pendahuluan

Di negeri ini, sementara tidak dapat disangkal terlihat bahwa demokrasi sedang menghadapi ujian bertubi-tubi, ujian terhadap demokrasi muncul dari berbagai dimensi. Semakin terbuka berbagai kasus korupsi baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif menunjukkan betapa bobrok sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Indeks persepsi korupsi di Indonesia meski ada upaya perbaikan masih merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Belum lagi ketidakpastian hukum yang ditandai dengan masih tidak transparan dan kurang jelasnya hukum di Indosesia, masih banyaknya perlakuan yang tidak setara dalam penegakan hukum serta berindikasinya tebang pilih dan politisasi dalam ranah hukum.

Berbagai kekerasan yang bermula dalam beberapa bulan terakhir juga bermunculan tanpa kejelasan dalam upaya cara menyelesaikannya secara tuntas dan mencegahnya untuk masa mendatang. Intensitas kekerasan yang terjadi di negara kita sudah pada tingkatan yang tidak dapat ditenggang dalam suatu sistem demokrasi. Dengan semakin tingginya apatisme publik terhadap prosedur demokrasi, politik uang juga semakin merajalela.

Mendung politik agaknya tengah berlangsung di republik kita, hampir satu tahun terakhir kita menyaksikan fenomena-fenomena politik mempertontonkan terkikisnya komitmen bersama mempertahankan kebebasan sipil dan politik sebagai komitmen tatanan demokrasi. Peristiwa- peristiwa publik itu menandai pengikisan pilar-pilar dasar kehidupan berdemokrasi. Setelah ekspos kasus skandal Bank Century memudar tanpa

penyelesaian hukum yang tuntas, daftar peristiwa penghancuran terhadap kehidupan demokrasi datang bertubi-tubi.

Kinerja para wakil rakyat juga belum memperlihatkan kemajuan dari partai-partai politik kita lebih berfungsi sebagai instrumen elite dari pada sebagai penyalur aspirasi rakyat. Di bidang ekonomi, juga memunculkan tentang kemungkinan semakin melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin ke depan. Belum lagi jika menggunakan standar tingkat kemiskinan yang lebih realistis, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Dalam tatanan publik dimana dukungan masyarakat terhadap demokrasi masih dalam taraf yang menjanjikan. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan berdasarkan mandat rakyat, oleh karena itu legitimasi dan eksistensinya sangat bergantung pada dukungan masyarakat.

Dukungan terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia datang dari dua aktor kunci yaitu elite dan akar rumput, namun harus dicatat bahwa dukungan ini bukanlah harga mati. Jika kita mau berpikir lebih kritis, dua fondasi demokrasi yang ada saat ini dapat dikatakan rapuh. Adanya indikasi formasi oligarki dalam politik Indonesia menunjukkan bahwa toleransi elite terhadap dominasi individu atau kelompok tertentu sudah mulai muncul. (Sunny Tanuwijaya, 2010 : 6)

Belum berhasilnya proses politik dalam demokrasi kita untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik dan adanya indikasi meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat mengikis secara signifikan dukungan dan kepuasan publik terhadap demokrasi. Masa depan demokrasi di Indonesia masih dirundung ketidakpastian, kita hanya perlu untuk berpikir realistis tentang demokrasi kita. Di sinilah pentingnya untuk menyelesaikan dengan segera berbagai ujian yang menjadi penghalang bagi tumbuh dan berkembangnya sistem dan nilai demokrasi yang murni dan utuh di Indonesia.

Di pandang dari etika demokrasi, politik oposisi dapat dikatakan sebagai kegiatan parlementarian yang paling terhormat, dalam tangga demokrasi dia mampu menempati ukuran tertinggi sebab mampu mencegah adanya ancaman mayoritarianisme. Padahal kita tahu bahwa perwakilan rakyat itu temporer sifatnya sedangkan kedaulatan itu permanen, sehingga pemberian suara dalam pemilihan umum bukanlah berarti penyerahan kedaulatan dari rakyat. Untuk itu kritik dan oposisi harus menjadi permanen dalam kehidupan demokrasi, yang artinya sekelompok masyarakat atau partai politik yang mengambil posisi sebagai oposisi yang akan mengkritisi dan mengawasi atau

mengawal secara ketat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa. Selama ini belum ada pelembagaan oposisi sebagai bagian dari unsur demokrasi secara nyata, yang ada hanya pada tataran teoritis saja.

Sistem Politik di Indonesia

Berangkat dari pendapatnya Almond dan Powell (Budi Winarno, 2007:6) mengemukakan bahwa sebuah sistem secara tidak langsung merupakan ketergantungan antar bagian-bagian dan batas antara sistem dengan lingkungan. Interdependensi mengandung makna bahwa ketika terdapat perubahan dalam salah satu bagian sistem politik maka perubahan ini akan mempengaruhi perubahan semua komponen dan keseluruhan sistem politik. Sebagai contoh, munculnya partai-partai politik baru akan mengubah dan mempengaruhi keseluruhan struktur sistem politik yang lain meskipun berada dalam derajat yang berbeda.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem politik ialah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, dan mengatur hubungan antara negara dengan negara lain termasuk dengan rakyatnya. Dengan demikian sistem politik merupakan tata cara untuk mengatur negara.

Jadi sistem politik Indonesia dapat dirumuskan sebagai suatu tata cara atau metode untuk pengurusan negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan kelestarian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Sukarna, 1990:7). Dalam sistem politik Indonesia akan dipengaruhi oleh sistem sosial, sistem ekonomi nasional dan internasional, sistem budaya baik nasional maupun internasional dan sistem-sistem yang lain yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Apabila sistem ekonomi nasional dan internasional kurang menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang menimbulkan kehidupan masyarakat banyak mengalami kemunduran-kemunduran, maka sudah barang tentu akan menimbulkan keresahan-keresahan sosial yang pada akhirnya dapat memuncak terhadap terjadinya keresahan-keresahan politik.

Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang ataupun di negara-negara blok komunis yang disebabkan rakyatnya tidak memperoleh kesejahteraan material dan

spiritual, maka terjadilah perubahan-perubahan pemerintahan atau perubahan sistem politik bahkan perubahan-perubahan konstitusi negara di dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan perekonomian nasional yang sehat agar supaya rakyat memperoleh pendapatan yang memadai bagi hidup dan kehidupannya. Di bidang ekonomi kehidupan rakyatnya sangat lemah, sehingga rakyat banyak menderita kekurangan-kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah perubahan-perubahan sangat drastis. Hal ini disebabkan rakyat tidak bisa di eksploitasi hak-hak hidupnya, walaupun dapat hanya bersifat sementara.

Sistem politik Indonesia secara filsafat, secara sosiologis, secara historis, secara ideologis, secara kultural, secara hukum, secara konstitusional adalah sistem politik demokrasi, disebabkan memiliki banyak argumentasi yang sangat kuat, diantaranya :

Menurut sejarah pada waktu masa silam rakyat kita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang berwilayah sangat luas sekali adalah hasil perjuangan dari pada seluruh rakyat yang bahu-membahu satu sama lain dengan semboyan pada waktu merdeka tau mati. Saat itu pula tidak ada yang bilang tidak mau merdeka, semua rakyat Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia dengan suara gemuruh memekikkan ingin merdeka sekarang juga.

Secara sosiologis masyarakat Indonesia suka melakukan musyawarah di dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak ataupun kepentingan-kepentingan keluarga. Hal ini sejalan sekali dengan ajaran atau prinsip demokrasi di mana rakyat kita dalam menghadapi permasalahan yang genting suka berdebat dan tukar pikiran atau mendiskusikan dengan menggunakan akal pikiran yang jernih, serta diplomasi yang rasional tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan kehidupan di masyarakat. Jadi keputusan biasanya diambil atas dasar hasil kesepakatan bersama baik secara keseluruhan ataupun sebagian besar yang mempunyai pendapat yang tidak berbeda.

Dilihat dari sudut kejiwaan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersikap terbuka walaupun masih ada hal-hal yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat Indonesia dapat menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat positif terutama terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi yang datang dari luar maupun budaya asing yang bersifat positif. Dengan adanya sikap keterbukaan dan

selektif dari masyarakat itu maka masyarakat Indonesia mudah dipacu untuk melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan ke arah kemajuan, walaupun ada sikap-sikap yang bersifat menolak terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat negatif.

Dilihat dari sudut filsafat yaitu merupakan way of life dari pada bangsa, atau masyarakat Indonesia di mana pola rasa, pola kehendak dan pola pikir menunjukkan adanya kebebasan di mana setiap orang mempunyai perasaan dan kehendak dan pikiran yang ingin bebas merdeka dengan tidak melupakan tanggung jawab terhadap masyarakat itu. Dari sudut ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, ideologi ini bukanlah ideologi yang tertutup melainkan karena merupakan hasil pemikiran tentang poleksosbud yang bersumber tidak hanya dari satu orang atau sedikit orang saja akan tetapi bersumber dari hasil pemikiran mayoritas rakyat Indonesia yang dijabarkan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Di samping itu ideologi Pancasila juga tidak menutup adanya masukan terhadap pemikiran-pemikiran dari rakyat biasa asal ada manfaatnya untuk kepentingan bangsa dan negara akan dapat diterima oleh ideologi Pancasila. .

Melihat sistem politik kita dari sudut konstitusi (UUD 1945) di mana terkandung adanya azas Rule of Law (pemerintahan berdasarkan hukum) serta terdapatnya hak-hak azasi manusia yang fundamental dan terjaminnya persamaan di muka hukum, maka sistem politik Indonesia secara konstitusional ialah sistem politik demokrasi.

Bila kita melihat dari sudut pandang budaya bahwa budaya bangsa Indonesia adalah budaya yang menghendaki adanya kemajuan-kemajuan pendidikan baik pendidikan di dalam ilmu sosial maupun ilmu tehnologi yang diakui sebagai sarana untuk memacu dan untuk memperoleh tingkat kehidupan yang layak dan lebih tinggi sehingga melahirkan peradaban yang tinggi dan manusiawi. Jadi, sistem politik Indonesia yang tidak selaras dengan berbagai faktor yang sangat penting dan saling terkait kehidupan bangsa kita akan mengalami kegagalan disebabkan bertentangan dengan hakekat dari pada masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri yang menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang beradab, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau hak-hak azasi manusia yang diberikan oleh Allah SWT yaitu hak hidup, hak mengejar kebahagiaan dan hak kemerdekaan.

Richard M.Ketchum (2004:85), sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

Sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (konsensus). Prinsip ini pula yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi.

Tujuan kebaikan bersama, persamaan kesempatan politik bagi individu dijamin dengan hukum, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. . Sistem ini menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi dari pada pemerataan hasil oleh pemerintah. Hal ini berarti setiap individu bebas mencari, dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama, seperti persaingan bebas yang wajar, undang-undang anti monopoli, dan peka pada lingkungan hidup. Jadi sistem ini menekankan pemenuhan kebutuhan materiil kepada masyarakat. (Ramlan Surbakti, 1992 : 228)

Faktor yang menyatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Eka) untuk Indonesia. Yang berarti, pada satu pihak penduduk tetap mempertahankan keterikatan dengan setiap subkultur seperti suku, daerah, ras, agama, dan adat-istiadat. Dengan kata lain, keterikatan penduduk terhadap setiap subkultur akan menimbulkan benturan (konflik) tetapi keterikatan pada dasar dan tujuan yang sama akan melahirkan konsensus. Bahwa pemerintah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat perlu memiliki kekuasaan yang memadai dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi, sedangkan anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa karena dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

Partai Politik

Partai politik telah menjadi ciri penting politik modern, hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem politik, baik

yang demokratis maupun yang otoritair sekalipun. Dalam hal ini. Partai politik mengorganisasi partisipasi politik, dan sistem kepartaian akan sangat mempengaruhi batas-batas sampai di mana partisipasi tersebut dapat diperluas.

Menurut Huntington (Budi Winarno, 2007: 98), bahwa stabilitas, kokohnya partai dan sistem kepartaian akan sangat bergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya. Partisipasi yang luas yang dibarengi dengan derajat rendah pelembagaan partai politik akan menghasilkan politik kekerasan, sedangkan partisipasi tanpa organisasi akan merosot menjadi gerakan massal, sementara organisasi yang tidak melahirkan partisipasi cenderung mengarah menjadi klik personal.

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik biasanya melaksanakan empat fungsi, yaitu sebagai *sarana komunikasi politik*, sebagai *sarana sosialisasi politik*, *sarana rekrutmen politik* dan sebagai *sarana pengatur konflik*. Sebagai sarana komunikasi politik, satu diantara sekian banyak tugas partai politik adalah menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Partai politik harus responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Di pihak lain, partai politik juga melakukan diskusi dan penyebarluasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik merupakan kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Hampir setiap partai politik mempunyai ideologi, cita-cita, yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Program-program kerja inilah yang ditawarkan kepada masyarakat agar mendukungnya dalam pemilihan umum. Dalam kaitan ini, partai politik membantu sistem politik dalam mensosialisasikan sistem politik dan mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar dan bertanggungjawab terhadap kepentingan sendiri dan kepentingan nasional. (Padmo Wajono dan Nasrudin S. 1995 : 591)

Rekrutmen politik, tujuan partai politik dimanapun mereka berada adalah dalam rangka meraih kekuasaan. Untuk itu, mereka perlu melakukan rekrutmen terhadap pemimpin-pemimpin politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik, partisipasi tanpa organisasi akan melahirkan gerakan massal. Oleh karena itu, partai politik berperan menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk disalurkan dalam sistem politik. Kestabilan partai politik akan sangat menentukan tingkat pelebagaan partisipasi dan dengan kemampuan partai politik dalam melakukan manajemen konflik.

Kontrol politik, suatu kegiatan partai politik untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif obyektif. Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbarui dirinya secara terus menerus.

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolok ukur yang pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Bahwa kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik oposisi terhadap kebijakan partai yang memerintah dapat menjatuhkan partai yang berkuasa apabila mosi tidak percaya karena pemerintah sulit memberi penjelasan yang memuaskan terhadap isi kontrol politik oposisi dan mendapatkan dukungan dari parlemen.

Sebuah sistem kepartaian yang kokoh dan mempunyai kapasitas, akan melakukan setidaknya dua hal yaitu ;

1. Melancarkan perluasan peran serta politik melalui jalur partai dan dengan demikian menguasai ataupun dapat mengalihkan segala aktivitas politik yang revolusioner.
2. Mempunyai kemampuan dalam menyalurkan partisipasi sebuah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan terhadap sistem politik.

Ketika partai politik melaksanakan fungsinya dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan yaitu meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan atau legislatif. Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Para pengamat nampaknya sepakat bahwa partai-partai politik yang lahir sejak reformasi dicanangkan kurang mampu melaksanakan fungsi politiknya dengan baik. Ini terjadi karena partai politik lebih berorientasi untuk memperebutkan kekuasaan dibandingkan dengan melaksanakan fungsi-fungsi politiknya.

Menurut Prof Dr.Budi Winarno,MA (2007:101) memaparkan, bahkan partai politik dituduh berperan besar dalam melakukan amnesia politik, ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal antara lain ; Di dalam tubuh partai politik mengalir deras semangat pragmatisme politik dan oportunisme, kedua hal semangat tersebut telah tereduksi menjadi kelaziman individu elite. Dalam situasi seperti ini, solidaritas dipahami dalam pengertian sempit yakni semata-mata ikatan kepentingan. Gejala ini dapat dilihat dari maraknya koalisi partai yang mempunyai ideologi berbeda, dan bahkan bertentangan pada masa lampau.

Masih adanya kesadaran yang keliru bahwa partai adalah kesatuan orang dengan segala kepentingannya dan kepentingan elite yang dominan dimutlakkan. Persoalan muncul ketika pada akhirnya kepentingan elitlah yang didahulukan dibandingkan dengan kepentingan publik. Partai politik kurang mempunyai ketegasan dalam hal ideologi dan kurang menanamkan ideologi pada kader-kadernya sehingga partai menjadi akumulasi kepentingan politik yang tidak mempunyai platform yang jelas.

Partai politik lebih cenderung mempunyai sasaran jangka pendek dalam bentuk perebutan kekuasaan lima tahunan. Sebaliknya, yang terjadi adalah format politiknya masih elite politik lama yang menggunakan jubah reformasi. Akibatnya, yang kemudian dirasakan adalah tidak adanya perbedaan antara era sebelumnya dan setelah bergulirnya reformasi.

Peran Oposisi

Salah satu komponen negara demokrasi yang membedakannya dengan negara otoriter adalah eksisnya unsur oposisi dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu negara, sehingga pemerintahan dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam penyelewengan kekuasaan. Oleh sebab itu, oposisi adalah salah satu elemen penting untuk membangun negara demokrasi yang kuat. oposisi semestinya tidak perlu dicemaskan dan kemudian menjadi takut untuk menerima kehadirannya. Justru adanya kekuatan oposisi untuk menjaga pelaksanaan negara demokrasi berjalan dengan baik dan demokratis.

Adapun sistem presidensial idealnya memang berpasangan dengan sistem kepartaian yang dwi partai. Namun yang terjadi di Indonesia adalah semipresidensial karena berhadapan dengan sistem kepartaian yang multipartai. Imbasnya, dalam pemilihan menteri misalnya yang semestinya menjadi kewenangan penuh presiden, selalu terganggu oleh represtasi partai politik.

Bagaimanapun, di dalam sistem yang semipresidensial seperti di Indonesia ini, peran oposisi sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan adalah sah sebagai bagian dari checks and balance dari negara demokrasi. Akan tetapi, ruang oposisi sebagai medan bagi bangunan demokrasi yang ideal seakan belum mendapatkan tempat dalam kehidupan partai politik Indonesia. Akibatnya fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan yang dijalankan pemerintah saat ini masih dirasa kurang efektif.

Jika partai politik dinilai masih belum efektif menjalankan fungsi kontrol, publik justru melihat lebih efektifnya fungsi tersebut diperankan oleh kekuatan civil society. Setidaknya hal itu terekam dalam sikap publik yang menilai lembaga-lembaga di luar parlemen, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi mahasiswa, sebagai lembaga yang cukup efektif memerankan fungsi kontrol.

Politik oposisi sejatinya adalah hal yang melekat di dalam demokrasi, ia dipraktikkan untuk menjami demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Sayangnya pelembagaan politik oposisi di Indonesia merupakan hal yang masih sulit terwujud. Kurang efektifnya peran oposisi di Indonesia boleh jadi akibat pemaknaan oposisi yang masih setengah hati. Sebab oposisi yang dimaui oleh publik lebih pada peran oposisi yang soft seperti menjadi penyeimbang,

pengontrol dan mitra kerja pemerintah. Sebaliknya, konsep peran oposisi yang dihindari publik adalah yang agak radikal seperti menjadi kekuatan lawan bagi pemerintah sebagaimana dikenal di negara-negara lain atau dalam terminologi ilmu politik. (BI Purwantari, 2011: 6)

Oposisi secara umum dapat dipahami sebagai kelompok kekuatan yang ingin mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru atau salah. Ada pula yang mengartikannya sebagai kekuatan yang semata-mata menentang setiap kebijakan dan langkah penguasa, tanpa menimbang apakah kebijakan tersebut masih dalam suatu kewenangan atau kesewenang-wenangan.

Apapun pengertian yang diberikan, oposisi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Perbedaan pendapat adalah rahmat untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Kesiediaan untuk mengoreksi dan mengkritik, kesiediaan untuk dikoreksi dan dikritik serta kesiediaan untuk berbeda pendapat inilah sebagai kunci pembuka untuk memasuki gerbang demokrasi. Karena itulah keberadaan oposisi adalah soko guru dari demokrasi dan setiap organisasi harus memiliki oposisi, walaupun tidak semua oposisi mampu menegakkan demokrasi. Namun tanpa oposisi, demokrasi ini terancam atau justru mati karena dalam sistem politik demokrasi penguasa harus dikontrol. Penguasa tidak boleh bekerja sendiri lantaran kekuasaan itu cenderung menyimpang.

Dengan demikian, hakekat oposisi terletak pada kejernihan memandang segala sesuatu serta konsistensi sikapnya dalam mendukung kebenaran. Untuk memnuhi hakekat inilah, sikap partisan yang dibenarkan dari oposisi adalah pemihakannya pada kebenaran dan kepentingan rakyat.

Kehadiran kekuatan oposisi ini dalam perpolitikan nasional masih belum dapat diterima, bahkan banyak kalangan yang menolaknya. Padahal dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) secara implisist kehadiran oposisi ini memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni dalam salah satu pasal yang tertuang dalam konstitusi disebutkan bahwa yang mengatur fungsi dan tugas-tugas dari DPR, diantaranya membuat undang-undang, menyusun anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pentingnya partai-partai politik yang tidak turut dalam pemerintahan mengambil peran oposisi dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka sebagai wakil rakyat untuk mengimbangi dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari ketentuan dalam konstitusi yang disertai penjelasannya. Politik oposisi kerap dilihat sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah. Oposisi dianggap sebagai tertundanya kesempatan berkuasa. Karena itu, oposisi menjadi identik dengan aktivitas menjatuhkan kekuasaan. (BI Purwantari, 2011: 6)

Sebaliknya, pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan karena itu ia akan mempertahankan diri dengan segala cara. Pada hal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif. Lebih jauh oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus diperjuangkan dalam kontestasi dan diuji dalam wacana terbuka.

Politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan, jika ini dipraktekkan demokrasi di Indonesia tak lagi sebatas retorika politik. Menilik persoalan di atas, nyata bahwa kehadiran oposisi merupakan suatu keniscayaan yang mendesak. Selain keberadaan pemerintahan yang absah dan secara efektif mampu menjalankan fungsinya, kehadiran oposisi akan memperkuat pilar demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi mempersyaratkan adanya mekanisme Checks and Balance, suatu mekanisme yang hanya akan dapat berjalan baik jika ada kekuatan politik di luar pemerintah.

Simpulan

Di tengah ambisi besar setiap partai atau tokoh politik untuk duduk di kursi pemerintahan, samarnya perbedaan ideologi dan kebijakan dasar partai tersebut memberi keleluasaan kepada mereka untuk mengembangkan oportunistik bergandengan tangan dengan pihak manapun. Kenyataan yang demikian semakin mempersulit munculnya suatu kekuatan oposan yang mampu menjadi penyeimbang sekaligus kekuatan politik alternatif. Suatu kekuatan politik yang mengingatkan ketika pemerintah melakukan kesalahan, tapi sementara ketika pemerintah berbuat bijak mereka berteriak untuk meminta agar kebijakan itu terus berlanjut., Oposisi adalah suatu alternatif yang memberikan pilihan kepada kita akan aktor dan kebijakan di luar kekuasaan pemerintahan, ketika pemerintah menggagas suatu kebijakan, maka kekuatan politik di luar pemerintahan akan menyuarakan kritisme. Politik memberi kita media untuk

berkonflik secara beradab, tetapi ironisnya sebagian dari kita justru menepikan konflik karena dianggap mengganggu harmoni. Pada posisi yang berbeda, kelompok masyarakat tertentu malah memaknai konflik secara ekstrem sebagai pertarungan hidup mati antara dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Kenyataan ini sepatutnya mengajarkan kepada kita bahwa berkonflik dan mengelolanya sebagai salah satu mata rantai demokrasi akan membuat kita jauh lebih bijak dalam menyikapi perbedaan.

Terobosan politik secara tegas menyatakan diri beroposisi terhadap pemerintah sebenarnya dapat memberi kontribusi bagi terbangunnya budaya oposisi di Indonesia. Akan tetapi, pada saat yang sama hal ini juga mesti diikuti oleh konsistensi sikap untuk melawan kekeliruan dan menuntut berlanjutnya kebijakan, bukan mengedepankan oportunisme dan keberpihakan terhadap kekuasaan semata. Dengan memainkan peran oposisi, memberikan kontribusi yang besar terciptanya pemerintahan yang bersih dan terbangunnya sistem politik dan perilaku politik yang demokratis

Daftar Pustaka

- Budi Winarno, 2007, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Medpress, Yogyakarta.
- BI Purwantisari, 2011, Stagnasi Dibalik Oposisi Setengah Hati, Kompas, Jakarta.
- Padmo Wahjono dan Nasrudin Syamsudin, 1995, Pengantar Ilmu Politik, Radar Grafindo Persada, Jakarta.
- Richard M. Ketchum, 2004, Demokrasi Sebuah Pengantar, Niagara, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sukarna, 1990, Sistem Politik Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Sunny Tanuwijaya, 2010, Nasib Demokrasi Kita, Kompas, Jakarta.